

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pergantian kekuasaan sebagai akibat tuntutan demokrasi dari rezim lama kepada rezim baru, ternyata di beberapa daerah menimbulkan persoalan. Tajamnya perebutan dan kepentingan politik antar kekuatan politik maupun intra kekuatan politik, mengakibatkan konflik yang seringkali tidak terhindarkan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Rivalitas politik, kadang-kadang bukanlah semata-mata sebagai akibat dari perbedaan persepsi, melainkan perbedaan kepentingan antar kekuatan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan di tingkat lokal. Selain itu, konflik yang terjadi mencerminkan sikap dan perilaku politik kekuatan politik lokal yang relatif masih belum siap. Hal ini dicerminkan belum siapnya infrastruktur pemilihan pejabat publik yang seringkali kontroversial, dipersoalkan oleh partai politik dan aktor politik serta kadang-kadang ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh partai politik maupun anggota legislatif yang partainya kalah dalam pemilihan jabatan politik lokal<sup>1</sup>.

Secara teknis proses politik tentang pemilihan jabatan politik tingkat lokal telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan peraturan pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil

kepala daerah. UU No.32/2004 yang menekankan bahwa pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56 ayat (1) serta melalui partai politik. Kewenangan partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah secara jelas tertuang pada Pasal 59 terutama pada ayat (1),(2),(3), (4), (5),(6) dan ayat (7) UU No. 32/2004.<sup>2</sup>

Namun realitasnya, walaupun pasangan calon terpilih oleh rakyat, sebagai proses politik lokal belumlah secara otomatis dapat ditetapkan sebagai proses yang final, masih menunggu pengesahan dari pihak pemerintah pusat, gubernur terpilih oleh presiden, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 109 UU No 32/2004). Dan apabila pengesahan dari proses politik lokal tersebut masih ada perbedaan interpretasi dan kepentingan, maka hasil proses politik lokal akan menuai persoalan yang seringkali menimbulkan konflik lokal.

Konflik lokal seringkali disebabkan oleh aktor-aktor politik pusat terutama para pemimpin partai politik yang memaksakan kehendak dengan mendrop calonnya dari pusat atau paling tidak harus mendapat persetujuan dari pusat partainya. Bukan saja mendrop calon kepala daerah, kadang-kadang mereka mengamankan calonnya agar terpilih. Hal semacam ini menguatkan asumsi bahwa pemimpin elit politik di Jakarta telah memaksakan proses politik tingkat lokal. Dan tidak mengherankan kalau sampai calon dari partainya tidak terpilih, mengganjal dengan berbagai cara dan argumen untuk menggagalkan calon terpilih

<sup>2</sup> Ioko I. Drihatmoko 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. IR2M Universitas Wabid

yang seringkali membawa persoalan isu primordialisme, isu agama, ras, kultural ke arena politik lokal. Persoalan seperti itu sering menjadi argumen politik lokal yang jauh dari rasionalitas politik demokrasi.

Perkembangan politik lokal, sebenarnya cukup menarik karena selama masa pemerintahan otoriter di bawah rezim orde baru dan orde reformasi pemilihan kepala daerah selalu saja dikuasai dan ditentukan oleh sekelompok elit di Jakarta maupun oleh sekelompok elit yang duduk di parlemen daerah. Era otonomi daerah dengan menggunakan instrumen politik UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berlangsung proses suksesi kekuasaan secara langsung dipilih oleh rakyatnya. Walaupun dalam implementasinya tak jarang masih memunculkan konflik politik. Namun yang jelas pilkada langsung telah terjadi interaksi politik antara elit politik dengan rakyat. Bahkan rakyat kadang-kadang dapat melakukan tekanan-tekanan yang bersifat kritis atas berbagai calon yang diusulkannya. Pergantian elit lokal, kadang-kadang menyebabkan terjadinya konflik, apalagi rakyat yang kehilangan identitas dan adanya ketidakadilan struktural akan mudah dimobilisasi ke arah konflik

berbagai pengalaman pilkada langsung yang telah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, konflik yang terjadi antara lain : konflik antara kandidat dengan KPUD, konflik antar kandidat serta konflik antar pendukung. Konflik antara kandidat dengan KPUD dapat terjadi apabila kandidat menggunakan mekanisme legal untuk melawan keputusan KPUD. Pasal 106 UU Pemerintah Daerah disebutkan "Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk

Pilkada & Pilwakada dan KPUD.<sup>3</sup> Sengketa pilkada yang menggunakan jalur ini dapat dilihat pada kasus Pilkada Sulawesi Selatan dimana pasangan Salim Amin Syam/Mansyur Ramly menggugat hasil keputusan KPUD Sulawesi Selatan.

Konflik antar kandidat dapat terjadi apabila kandidat memiliki ketidakpuasan atas cara-cara yang dilakukan oleh kandidat lainnya dalam memenangkan pilkada. Ketidakpuasan ini diekspresikan menggunakan jalur yang disediakan oleh peraturan perundangan. Dalam pasal 112-114 PP No.6/2005 yang mengatur tahapan penyelesaian sengketa, Panwas akan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Bila tidak terjadi kesepakatan, maka Panwas akan membuat keputusan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sementara, bila terjadi laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, maka akan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian pemeriksaan dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sengketa Pilkada Kota Solok menggunakan cara seperti ini dimana calon bupati terpilih yang ditetapkan oleh KPUD divonis 15 hari kurungan oleh Pengadilan Negeri berkaitan pelanggaran kampanye yang dilakukannya. Namun upaya banding ke Pengadilan Tinggi berakhir dengan keputusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menyerahkan persoalan kepada DPRD setempat.<sup>4</sup>

Potensi konflik yang paling mengkhawatirkan adalah konflik antar pendukung. Pengerahan massa yang tidak terkendali akibat ketidakpuasan kolektif akan menghasilkan anarkisme. Di sini dibutuhkan moralitas politik para

<sup>3</sup> Joko J. Prihatmoko.2005. Op.cit. Hal. 130

<sup>4</sup> <http://www.google.com>. *Antisipasi konflik pilkada*. 06 November 2007. akses 23 April 2008 jam 21.30 WIB

pemimpin yang bertikai jangan sampai para pemimpin mengedepankan konsep Machiavelli dalam meraih kekuasaan. Menurut Machiavelli, kekuasaan adalah lingkaran setan yang tidak bermoral karena seringnya menghalalkan segala cara. Seorang penguasa menurutnya adalah orang yang sanggup meraih dan mempertahankan kekuasaan, lepas dari dimensi etis yang digunakan.

Pengalaman paling dekat mengenai Pilkada yang mengakibatkan konflik adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013. Pemilihan tersebut sudah dilaksanakan 5 November 2007 dan pengumuman hasil penghitungan sudah dilaksanakan 11 hari kemudian, 16 November 2007. Akan tetapi, ternyata imbas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan masih terasa hingga bulan Januari 2008. Yang membuat menarik, berbagai media nasional (seperti Harian Kompas, Harian Tempo, Harian Republika dan Harian lainnya) mewartakan imbas ini.

Kalau mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang penjelasan bagi pelaksanaan Pilkada langsung, seharusnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013 sudah selesai pada bulan November 2007. Ternyata, Pilkada langsung yang melibatkan tiga pasangan ini (Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu'mang, Amin Syam/Mansyur Ramly dan Azis Kahar Mudzaqkar/Mubyl Handaling) tidak mencerminkan apa yang diharapkan.

Apa yang diharapkan adalah pelantikan pasangan calon Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu'mang (Seveng) sebagai pemenang Pilkada menurut hasil

rekapitulasi 14 November 2007<sup>5</sup>. Apa yang menjadi kenyataan adalah penundaan pelantikan bagi pasangan pemenang tersebut. Tidak hanya penundaan, Pilkada langsung ini juga menimbulkan konflik yang melibatkan massa pendukung Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu'mang (Sayang) sebagai pemenang Pilkada.

Rencana pelantikan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2008-2013, masih "tertahan" di Mahkamah Agung (MA). Sebab, sampai saat ini, salinan putusan hasil Peninjauan Kembali (PK) yang memenangkan gugatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, belum juga dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Informasi itu disampaikan Kasubdit Regional V Depdagri Imam Supaganto, pada 21 Maret 2008.<sup>6</sup>

Jika proses administrasi pelantikan Syahrul-Agus selesai, akan secara otomatis prosesi pelantikan langsung dilakukan. "Hanya saja, sampai hari ini lampiran keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) KPU Sulawesi Selatan., belum diterima Depdagri. Makanya, proses administrasi pelantikannya belum juga bisa jalan. Jika saja salinan putusan yang juga menegaskan pasangan Syahrul-Agus sebagai pemenang pemilihan gubernur/wakil gubernur Sulawesi Selatan., maka dengan sendirinya proses administrasi pelantikan pasangan yang akrab dengan sebutan Sayang, itu bisa segera diproses. "Sama sekali tak ada upaya untuk mempersulit pelantikan

<sup>5</sup> Harian Kompas, 21 Desember 2007

<sup>6</sup><http://www.mediaindonesia.com>. Syahrul Yasin Limpo dan agus Arifin Nu'mang dilantik 08 April. Akses 07 April 2008 jam 23.30 WIB.

*gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan,” tegas Imam. “Mudah-mudahan saja salinannya sudah bisa diterima Depdagri pada tanggal 24 Maret 2008” .<sup>7</sup>*

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Selatan. yang dikonfirmasi mengenai hasil PK KPU Sulawesi Selatan.tersebut, melalui Kahumasnya, JMT Simatupang menyebutkan, prosedur pengiriman salinan PK biasanya memakan waktu antara tiga sampai empat hari.

*“Karena Kamis dan Jumat libur, mungkin Senin baru kita terima putusannya. Itupun perkiraan tercepat kita,” kata Simatupang saat dihubungi via ponselnya. Kalaupun tertunda, Simatupang menambahkan, paling telat 10 hari pasca penetapan hasil.<sup>8</sup>*

Menurut Simatupang, bila pihaknya sudah menerima putusan tersebut, PT Sulawesi Selatan pasti akan melanjutkannya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Baik KPU Sulsel, maupun pasangan calon gubernur HM Amin Syam-Mansyur Ramly yang menjadi termohon dalam kasus ini. *“Sudah menjadi kewajiban kami untuk menembuskannya kepada yang bersengketa, baik termohon maupun pemohon PK,” terangnya.<sup>9</sup>*

Di pihak lain, Syahrul Yasin Limpo yang dihubungi mengatakan, kendati KPUD Sulsel atau pun Depdagri belum menerima salinan putusan MA, namun dirinya bersama Agus selalu yakin akan dilantik dalam waktu dekat ini.

*“Saya sudah berkali-kali mengatakan, bahwa kemenangan saya bersama Agus adalah kemenangan rakyat Sulsel yang sulit diubah-ubah, biar dengan cara bagaimana pun. Kalau itu diubah, tentu masyarakat akan protes atas perampasan hak,” kata Syahrul melalui telepon.<sup>10</sup>*

Mantan Bupati Gowa dua periode ini menambahkan, dirinya bersama

Agus berharap pelantikan bisa dilakukan secepatnya agar seluruh program atau

<sup>7</sup> Ibid

visi dan misi pasangan yang akrab disapa Sayang, ini bisa direalisasikan. *"Program pendidikan dan kesehatan gratis yang saya dan Agus janjikan sebagai sebuah kontrak sosial, harus segera diwujudkan. Apalagi keputusan MA sudah jelas," tandasnya.*<sup>11</sup>

Pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang dijadwalkan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur (wagub) Sulawesi Selatan pada 8 April mendatang. Rencana itu disampaikan Syahrul yang baru tiba dari Jakarta menghadiri undangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. *"Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya dan Pak Agus akan dilantik Selasa (8/4) pagi," kata Syahrul, Jumat (4/4).*<sup>12</sup>

Konflik massa pasca pilkada sulsel masih terus terjadi, berbagai kerusuhan, pengrusakan, pembakaran ban dan ancaman untuk terus melakukan kerusuhan terus didengungkan oleh pendukung sayang. Massa Sayang turun ke jalan sejak 1 bulan terakhir. Setiap hari secara bergantian mereka menggoyang gedung DPRD. Bahkan mereka memiliki panggung permanen yang dipasang di depan pagar. Selain minta Amin Syam yang dalam pilkada berpasangan dengan Mansyur Ramli turun, mereka juga menolak adanya caretaker gubernur. Mereka mendesak pasangan Sayang tetap dilantik 19 Januari nanti.

*"Kalau tidak, kita akan merusuhkan Makassar," teriak massa. Ribuan pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) mengepung gedung DPRD dan kantor gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Ban-ban bekas ditumpuk, lalu dibakar. Selain orasi, 2 pendukung Sayang diketahui juga membawa parang. Sambil berteriak, mereka mengacungkan parangnya ke udara. Mereka meminta agar jagoannya segera dilantik.*<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

Tepat pada tanggal 19 Januari 2008 pasangan sayang belum juga dilantik, sehingga memaksa pendukung sayang tersebut untuk turun kejalan, Lebih dari 10 ribu pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) tumpuk di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan.. Mereka sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat. Aksi ini terjadi di pintu utama yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Makassar, semula massa hanya bisa masuk dari pintu belakang rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Sungai Tangka. Aparat sempat menghalangi keinginan mereka. Namun pendukung Sayang terus merangsek. Mereka bahkan beramai-ramai menyingkirkan barikade kawat berduri sepanjang 100 meter yang melintang di depan pagar. Massa Sayang yang berusaha masuk ke halaman ditahan aparat sehingga terjadi aksi dorong-dorongan. Namun kekuatan massa yang sangat besar membuat aparat tak berkutik. Massa berhasil merusak pagar, sehingga besi pagar patah. Selain merangsek lewat pintu utama, massa juga berloncatan dari pagar. Sementara pendukung yang sudah masuk halaman terus berorasi. Mereka menolak pejabat caretaker, dan mendeklarasikan pasangan Sayang sebagai gubernur dan wagub. Mereka minta Syahrul sudah harus masuk kantor gubernur Senin nanti. *"Kalau caretaker yang masuk, kita akan duduki kantor gubernur lagi," teriak para orator. Jumlah massa pendukung Sayang ini semakin siang semakin bertambah. Jumlah mereka diduga melebihi 10 ribu orang.*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid

Ribuan pendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'man (Sayang) mengancam melumpuhkan obyek-obyek vital. Selebaran berisi imbauan damai pun disebarakan Polda Sulawesi Selatan. lewat helikopter. Pendukung Sayang mengancam menduduki obyek vital itu jika Sabtu (19/1/2008) ini, jagoan mereka tidak dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.. Heli Polda mulai mengitari Kota Makassar sejak pukul 11.00 WIB. Heli terbang rendah di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Di tempat inilah, selebaran berwarna merah dan kuning itu disebar. Selebaran Polda berisi antara lain, "Mari ciptakan suasana damai di Kota Daeng yang kita cintai" dan "Kita bersaudara mari sipakatau (saling menghargai), sipakainga (saling mengingatkan), sipakalebbi (saling menghormati)". Hingga siang hari, pendukung Sayang yang turun ke jalan terus bertambah. Jumlah mereka diperkirakan akan mencapai ribuan. Aksi demo besar-besaran ini sudah digelar sejak beberapa hari lalu.<sup>15</sup>

Aksi anarkis kembali dilakukan simpatisan Sayang, Sabtu, 19 Januari. Tercatat, sebanyak dua kali *show room* mobil Toyota milik Hadji Kalla yang berada di Jl Sultan Alauddin dilempari massa yang datang dari luar Makassar menuju ke Rujab Gubernur. Akibatnya, beberapa kaca bagian depan *show room* pecah berantakan. Tidak hanya itu, pos satpam yang berada di bagian depan, juga tidak luput dari tindakan brutal itu. Kaca yang pecah dilempari dengan menggunakan batu dan kayu. Bahkan, sebuah bangku besi juga terlihat berserakan di halaman *show room*. Bangku besi itu, juga digunakan untuk memecahkan kaca. Aksi anarkis pertama terjadi kira-kira pukul 11.45. Wita. Iring-iringan pendukung

---

<sup>15</sup> Ibid

Sayang yang masuk dari arah selatan berjumlah ratusan orang melintas di depan show room. Beberapa orang yang mengendarai sepeda motor, sempat berhenti di depan show room dan melakukan pelemparan. Aksi itu kemudian memicu pelemparan yang lebih besar yang dilakukan massa lainnya.

*“Ada yang turun dari motor dan mobil. Mereka kemudian langsung melakukan pelemparan dengan batu yang telah disediakan,” kata Iswadi, warga Jl Sultan Alauddin. Mereka yang turun dari kendaraannya, meringsek hingga ke pagar show room. Aksi tersebut membuat sejumlah pegawai yang berada di dalam show room panik. Mereka pun berlarian ke belakang gedung untuk menghindari amuk massa.<sup>16</sup>*

Pelemparan yang dilakukan massa Sayang itu berlangsung lima menit. Selanjutnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Rujab gubernur di Jl Jenderal Sudirman. Insiden pelemparan kedua terjadi kira-kira pukul 13.00 Wita. Puluhan orang yang berasal dari arah selatan Makassar, kembali melempari show room tersebut. Ironisnya, saat terjadi pelemparan kedua, aparat kepolisian yang sudah berada di tempat tidak dapat berbuat banyak. Bahkan, hingga sore kemarin, belum satu pun pelaku perusakan yang ditangkap. Meski demikian, Direskrim Polda Sulawesi Selatan., Kombes Pol Sobri Effendi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menegaskan, telah mengidentifikasi pelaku dengan mengetahui jenis kendaraannya. Untuk identifikasi lanjutan, pihak kepolisian menurunkan tim laboratorium forensik (*labfor*) Polda Sulsel. Tim tersebut, langsung mengidentifikasi sejumlah kerusakan akibat aksi pelemparan. Sementara show room tersebut langsung dipasang *police line*.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> <http://www.detik.com>, *Kisah pilkada Sulsel*, akses tanggal 04 April 2008 jam 23.00 WIB

Ratusan pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'man (Sayang) dan Amin Syam-Mansyur Ramli (Asmara) kembali saling berhadapan di DPRD Sulawesi Selatan. Kedua kubu beberapa kali nyaris bentrok. Sekitar pukul 10.00 Wita, sekitar 300 orang pendukung Asmara tiba di gedung DPRD Sulawesi Selatan., Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (2/1/2008). Mereka masuk ke halaman DPRD Sulawesi Selatan. dan menuntut Pilkada ulang di 4 kabupaten sesuai dengan keputusan mahkamah agung MA, Namun beberapa saat kemudian, sekitar 500 pendukung Sayang juga tiba di lokasi yang sama. Mereka meminta DPRD Sulawesi Selatan. segera melantik pasangan Sayang sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Suasana panas pun tidak terhindarkan saat dua kelompok berbeda kepentingan ini saling berhadapan. Kedua kubu adu orasi dan saling ejek satu sama lain. Kondisi ini membuat personel kepolisian yang jumlahnya sedikit kewalahan. Untuk mencegah bentrokan, mereka hanya bisa menutup gerbang DPRD Sulawesi Selatan. agar kedua kubu tidak bertemu langsung. Meski demikian, satu dua orang pendukung Asmara dan Sayang sempat terlibat adu jotos. Sekitar pukul 10.30 WIB, jumlah massa Sayang terus bertambah. Akhirnya polisi berinisiatif membuka pintu sisi kanan DPRD Sulawesi Selatan. dan menggiring massa Asmara keluar. Namun melihat lawannya keluar, massa Sayang mencoba merangsek maju dan menyerang massa Asmara. Beruntung polisi bisa mencegah hal tersebut. Saat ini seluruh pendukung Asmara

Unjuk rasa menolak putusan MA yang meminta Pilkada Ulang nyaris berlangsung tiap hari di Makassar. sekitar 500 orang guru mendatangi kantor DPRD Sulawesi Selatan., Jl Urip Sumohardjo, Makassar. Mereka meminta agar pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang dilantik tanggal 19 Januari ini. Jika kemarin yang berunjuk rasa adalah para dokter dan perawat, hari ini giliran guru yang berunjuk rasa mendukung pasangan Sayang. Dengan masih memakai baju dinas, para guru yang sebahagian besar dari sekolah negeri ini memenuhi halaman gedung dewan. Mereka berorasi secara bergantian. *"Kita ingin Syahrul segera dilantik. Agar pendidikan gratis segera terlaksana," teriak salah seorang guru dari atas panggung yang telah mereka persiapkan.*<sup>19</sup>

Dari fenomena pilkada yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mendorong penulis untuk mengangkatnya dalam Skripsi, latar belakang penulis mengambil judul "Faktor-faktor penyebab konflik massa pasca pilkada Sulawesi selatan 2007" ini karena, konflik yang terjadi didalamnya lebih komplit dan beragam, ditambah dengan dianulirnya keputusan KPUD Sulawesi Selatan oleh MA, sehingga penelitian ini membutuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut, juga melihat sejauh mana kekuatan hukum keputusan KPUD, dan juga sebagai ujian bagi relevan atau tidaknya UU No 32/2004, dalam penyelenggaraan pilkada langsung, atau malah UU tersebut harus Di revisi agar relevan dengan perkembangan demokrasi dewasa ini.

Konflik massa yang terjadi setelah Pilkada langsung di Sulawesi Selatan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013

---

<sup>19</sup> Ibid

mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini beranjak dari asumsi bahwa konflik mencerminkan perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, keistimewaan tradisi, dan sumber daya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah proposal penelitian ini, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah

**“Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab konflik massa pasca langsung di Sulawesi Selatan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2007 dan bagaimana Resolusi konfliknya.?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah **“Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Faktor-faktor penyebab dan Resolusi konflik massa pasca Pilkada langsung di Sulawesi Selatan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2007”**.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dan konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penyebab konflik massa pilkada langsung.

**b. Pihak Akademisi Ilmu Pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi akademisi ilmu pemerintahan dalam pengembangan kajian tentang otonomi daerah dalam kaitannya dengan penyebab konflik pilkada

**c. Pemerintah pusat dan Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya resolusi konflik pada konflik massa pilkada.

**d. Masyarakat pada umumnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepedulian masyarakat terhadap proses pilkada khususnya resolusi konflik pilkada yang akhirnya juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

Dalam upaya menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi-politik untuk menjabarkan teori konflik, massa, pilkada dan beserta resolusinya.. Teori- teori ini relatif relevan dengan tema yang sedang dibahas. Teori-teori ini akan menjadi pisau analisis dalam membedah

..... faktor penyebab konflik massa pilkada langsung di

## 1. Teori Konflik

### a. Pengertian Konflik.

Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi dalam hubungan proses produksi yang termanifestasikan dalam pemogokan buruh yang memiliki tuntutan ekonomis berupa kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Pertikaian antar kelompok etnis yang berbeda dalam memperebutkan sumber yang sama juga tidak jarang terjadi dalam masyarakat yang mejemuk. Demikian juga konflik yang memiliki motif keagamaan. Pertentangan antara kelompok keagamaan yang satu dengan kelompok keagamaan yang lain sering kali terjadi, karena masing-masing berusaha mempertahankan kemurnian ajaran yang diyakininya. Sedangkan dalam kehidupan politik masyarakat sering dihadapkan pada konflik dalam rangka untuk mendapatkan dan atau memperjuangkan sumber daya langka yang tidak jarang disertai dengan kekerasan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian konflik adalah pertentangan; percekocokan, pertentangan adalah perlawanan (yang berlawanan atau bertentangan); perselisihan yang sangat (ketidakcocokan dsb)<sup>20</sup>. Dalam Software WordWeb Dictionary, Konflik adalah suatu perselisihan terbuka antara dua kelompok atau individu yang berlawanan (*An open clash between two opposing groups or individuals*)<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 1251

<sup>21</sup> Software WordWeb Dictionary, Princeton University

Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama<sup>22</sup>.

Teori Konflik menurut Dahrendorf, melihat keteraturan yang terdapat dalam masyarakat, berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya, oleh mereka yang berada di atas<sup>23</sup>. Kedudukan orang di dalam masyarakat atau kelompok tidak sama, karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tergantung. Max Weber, mendefinisikan kuasa sebagai sifat-sifat dan kondisi-kondisi seseorang yang memberikan kemungkinan padanya untuk memaksakan kemauannya pada orang lain sekalipun orang lain tidak setuju<sup>24</sup>. Meskipun tidak disukai, konflik merupakan suatu hal yang niscaya terjadi di dalam kelompok masyarakat manapun. Masyarakat yang menghindari konflik adalah masyarakat yang tidak akan mengalami perubahan dan kemajuan apapun.

Suatu konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik berdimensi sosial bisa diartikan sebagai perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, keistimewaan tradisi, dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga mengamankan, menetralkan,

<sup>22</sup> Ramelan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 145

<sup>23</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta, hal. 155

<sup>24</sup> Max Weber, 1993, *Essays on Sociology*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.

melukai atau mengurangi kualitas-kuantitas saingan-saingan mereka. Bila politik didefinisikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka pola ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Siapapun yang menduduki posisi sosial tinggi maka dia berkesempatan untuk berkuasa dan lebih mudah menjadi pemimpin politik. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala usaha, tindakan, atau suatu kegiatan manusia dalam meraih kekuasaan suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah, atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat<sup>25</sup> Tindakan itu potensial memunculkan pergesekan antar kelompok yang berujung pada konflik dan polemik..

Lebih jauh dalam aspek politik, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan. Pengertian konflik di sini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan<sup>26</sup>

Menuru teori *Biological and psychological theories*. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar (internal dan Eksternal) individu tersebut. Ketika kebutuhan pribadi ditranformasikan kedalam interaksi politik, maka prilaku individu akan menjadi bersifat politik.

*Conflict has an inside and an outside dimension. It arises out of the internal dimensions of individuals acting singly or in the groups, and also out of external condicions and social structures. At all levels of analysis,*

<sup>25</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Terj. Helly P. Soecipto dan Sri Moelyati Soecipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal. 21

*large organisasi aggregates of human being affect smaller aggregates and individualis, and vice versa.*<sup>27</sup>

#### b. Teori Penyebab Konflik.

Ada berbagai teori penyebab konflik, misalnya teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berada dalam suatu masyarakat. Sedangkan teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan-perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Teori transformasi yang menganggap konflik terjadi karena masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidak adalan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial budaya dan ekonomi.<sup>28</sup>

Dalam pendekatan sosiologo-politik, konflik disebabkan oleh pertentangan antara elit politik. Konflik biasanya disebabkan pada keadaan dimana seseorang atau kelompok dengan identitas yang jelas, terlibat pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain karena kelompok ini mengejar atau berusaha mencapai tujuan. Pertentangan itu polanya dapat hanya sebatas pertentangan nilai, atau menyangkut klaim terhadap sesuatu (jabatan politik), kekuasaan dan atau sumberdaya-sumberdaya yang terbatas, serta dalam prosesnya sering ditandai oleh adanya upaya dari masing-masing pihak untuk saling menetralisasi, menyederai, hingga mengeliminasi posisi/eksistensi rival/lawannya (Cosser, 1956:3). Konflik merupakan suatu pertumbuhan antara dua atau lebih dari

---

<sup>27</sup> James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1990. *Contending theories of international relation*. Harper collins publishers. Hal. 274

dua pihak, yang masing-masing mencoba menyingkirkan pihak lawannya dari arena kehidupan bersama atau setidaknya menaklukkannya, dan mendegradasikan lawannya keposisi yang paling ter subordinasi.<sup>29</sup>

Menurut A. Zaini Basri bahwa pada umumnya, ragam penyebab konflik pilkada bersumber pada tiga penyebab, yakni masalah politik uang, persoalan administrasi pencalonan, dan sengketa penghitungan suara.<sup>30</sup>

Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik<sup>31</sup>. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budaya tidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Soetandyo Wingiosoebroto, 2006. Konflik: Masalah Fungsi dan pengelolaannya.... makalah disampaikan dalam Diskusi *Pengelolaan dan Antisipasi Konflik di Jawa Timur*, yang diselenggarakan dewan pakar Provinsi Jawa Timur, Tanggal 14 Juni 2006 dibalitbang Provinsi Jawa Timur, Hal 2

<sup>30</sup> Lili Romli. *potret otonomi daerah dan wakil rakyat ditingkat lokal*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2007. hal. 347

Dalam pandangan budaya, pemakaian simbol budaya merupakan sarana yang efektif untuk menjalin ikatan untuk menyatukan kepentingan dan bertindak secara bersama-sama. Selain itu untuk tujuan politik, baik untuk melakukan mobilisasi massa atau memecah belah massa, mekanisme penggunaan simbol primordialisme telah terbukti cukup berhasil<sup>33</sup>.

Penjelasan konflik dari sisi ekonomi, Frances Stewart mengemukakan empat hipotesis. Hipotesis tersebut oleh Stewart dipakai untuk menganalisa sebab-sebab peperangan antar negara. Keempat hipotesis tersebut adalah,

- i) motivasi kelompok dan kesenjangan horisontal;
- ii) motivasi perorangan;
- iii) Kontrak sosial yang gagal;
- iv) hipotesis perang hijau. Keempat hipotesis tersebut juga dipakai oleh Stewart untuk menjelaskan dari sisi politik<sup>34</sup>.

Banyak studi ekonomi dan politik untuk mempelajari akar masalah konflik memperlihatkan bahwa motivasi kelompok dan kesenjangan horisontal menyebabkan pertikaian antarkelompok. Satu sama lain ingin menunjukkan identitas budaya yang dimiliki dan dimensi kesenjangan horisontal selalu melibatkan masalah sosial, politik dan ekonomi. Apabila hal tersebut tercampur dengan kepentingan ekonomi dan politik, maka akan menyebabkan eskalasi konflik yang lebih besar disertai dengan tindak kekerasan<sup>35</sup>.

Konflik di satu sisi memang menimbulkan dampak destruktif. Di sisi lain

konflik juga dapat memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu

Dalam konteks ini motivasi perorangan berperan cukup penting dalam menciptakan konflik. Konflik sengaja dipakai untuk menaikkan posisi tawar yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi atau politik atau kedua-duanya. Istilah aktor intelektual, merujuk kepada konteks ini. Seperti konflik antar suku yang dimotivasi menaikkan seseorang ke tampuk kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Terlepas pendekatan motivasi pribadi atau perorangan kurang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang konflik, namun tidak bisa dinafikan motivasi perorangan berperan penting dalam konflik<sup>36</sup>.

Konflik berarti pula sebagai bentuk kontrak sosial yang gagal, baik antara suku yang berbeda, atau antara rakyat dengan negara. Hipotesis Stewart tentang kontrak sosial bertolak dari pandangan bahwa stabilitas sosial secara implisit berangkat dari premis bahwa terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah. Kontrak sosial tersebut dapat dilihat penerimaan wewenang pemerintah oleh rakyat sepanjang kewenangan tersebut dipakai untuk memberikan layanan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Tekanan penduduk, seperti telah dikemukakan di atas, menyebabkan kelangkaan sumberdaya dan kerusakan lingkungan, dan berdampak menciptakan kemiskinan sebagai bentuk kesenjangan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Pendekatan hipotesis perang hijau menjelaskan bahwa kekayaan dan kemiskinan mendorong orang untuk bertikai untuk memperoleh kendali terhadap pemanfaatan

### c. Pemetaan Konflik

Dalam menyelesaikan konflik banyak cara yang dapat digunakan, beberapa alat bantu dan teknik dapat dilakukan. Untuk dapat mengetahui situasi dengan baik kita bisa menggunakan cara Pemetaan konflik. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis. Menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka bersama. Mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.<sup>38</sup>

## 2. Teori Massa

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, massa antara lain diartikan sebagai jumlah yang banyak sekali; sekumpulan orang yang banyak sekali (berkumpul di suatu tempat atau tersebar)<sup>39</sup>. Menurut Y, S Gunadi, 2 massa adalah kelompok orang yang mempunyai ciri

- (1). Kelompok tersebut bukan organisasi sosial,
- (2). Kelompok tersebut tidak mempunyai pemimpin,
- (3). Kelompok tersebut tidak mempunyai norma,
- (4). Kelompok tersebut tidak mempunyai status hukum, dan
- (5). Kelompok tersebut tidak ada tata tertib yang mengatur<sup>40</sup>.

Sebagaimana karakteristik massa Y, S Gunadi, istilah massa biasanya lebih besar daripada kebanyakan kelompok, kerumunan dan publik. Massa sangat

<sup>38</sup> Hand out mata kuliah *Negosiasi dan resolusi Konflik*. Dosen Arrohman Mardiansyah. S.IP.

<sup>39</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 1347.

<sup>40</sup> YS. Gunadi, 1998, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Jakarta, Grasindo, hal. 75

tersebar luas dan para anggota biasanya tidak mengenal satu sama lain atau bahkan terhadap siapa yang menyebabkan massa tersebut eksis. Massa kehilangan atau kurang memiliki kesadaran diri dan identitas diri, juga tidak mampu untuk bertindak bersama dalam sebuah cara yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Massa ditandai oleh suatu komposisi yang mengalami peralihan dalam batas-batas yang berubah pula. Ia tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tapi lebih karena "bertindak atas harapan atau kontrol pihak lain". Massa bersifat heterogen, berasal dari seluruh lapisan sosial dan kelompok demografis; namun massa bersifat homogen dalam tingkah lakunya ketika memilih suatu obyek atau kepentingan dan menuntut pada persepsi dari mereka yang memanipulasinya.

Herbert Blumer membedakan definisi massa dalam perbandingan dengan bentuk kolektivitas lain yang kita temukan dalam kehidupan sosial, khususnya kelompok, kerumunan, dan publik. Kelompok merupakan kumpulan terkecil, di mana semua anggota saling mengenal dan menyadari keanggotaan mereka. Anggota memiliki nilai-nilai yang sama dan struktur hubungan yang bersifat stabil dari waktu ke waktu. Mereka berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu<sup>41</sup>.

Pada kerumunan, jumlah orang yang terlibat lebih besar dari kelompok, tapi masih dapat diamati dalam suatu ruang tertentu. Namun kerumunan bersifat sementara dan jarang sekali dapat dibentuk kembali dalam komposisi yang sama. Kerumunan bisa saja memiliki kadar identitas yang tinggi dan perasaan yang sama, tapi biasanya tidak terdapat struktur dan aturan tertentu menyangkut segi

---

<sup>41</sup> Nuruddin, 2002, *Komunikasi Massa*, Malang: GESPIB, hal. 15

moral dan sosialnya. Kerumunan dapat pula melakukan suatu tindakan, tapi tindakan itu seringkali bersifat emosional dan irasional<sup>42</sup>.

Menurut Blumer, bentuk publik memiliki anggota dalam jumlah sangat besar, tersebar luas dan bertahan lama. Publik cenderung terbentuk di seputar sebuah isu atau kasus dalam kehidupan publik tersebut dan tujuan utamanya adalah untuk memenangkan kepentingan atau pendapat mereka serta untuk mencapai perubahan politis. Publik merupakan unsur penting dalam institusi politik demokratis, yang didasarkan pada diskursus rasional pada sebuah sistem politik terbuka, dan anggota publik umumnya merupakan lapisan yang memperoleh informasi lebih baik dalam masyarakat<sup>43</sup>.

Dalam pendekatan sosiologi-politik, massa dibagi ke dalam tiga kategori besar. Yakni, (1) massa moral; (2) massa kalkulatif; dan (3) massa alienatif.

Massa moral adalah massa yang potensial terikat secara politik pada satu Orsospol karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral bersifat tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Massa kalkulatif adalah massa yang memiliki sifat-sifat yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi oleh masyarakat di sekelilingnya. Massa ini akrab dengan modernitas, sebagian besar menempati lapisan tengah masyarakat, memiliki sifat kosmopolit (berpandangan mendunia) dan punya perhitungan (kalkulasi) terhadap berbagai interaksi. Massa alienatif adalah massa yang teralienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilisasi politik<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 16.

<sup>43</sup> Ibid, hal. 17

<sup>44</sup> Ibid, hal. 18

Dalam konteks konflik elit, peran massa kadang-kadang dimanipulasi untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan elit politiknya. Tak jarang mereka juga mempunyai motif, kepentingan dan tujuan yang berbeda.

### 3. Pilkada

Bentuk pemilihan langsung Kepala Daerah adalah hal baru yang menggantikan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Pilkada langsung dinilai sebagai kerangka system (*system framework*) bagi pelaksanaan partisipasi publik; legitimasi politik; akuntabilitas pemerintahan dan check and balance di satu sisi. Walaupun belum bisa sepenuhnya mampu menjawab persoalan *money politics* di sisi lain. Padahal persoalan inilah yang pada mulanya ingin dihilangkan dengan system pemilihan langsung ini.<sup>45</sup>

Tanggal 11 Februari 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 yang memberikan penjelasan bagi pelaksanaan Pilkada langsung. Tanggapan beragam pun bermunculan. Regulasi ini akan terus berlanjut seiring dengan penyelenggaraan Pilkada langsung terutama bagi 33 Provinsi, 349 Kabupaten dan 91 Walikota di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada langsung.<sup>46</sup> Di Jawa Tengah tercatat 17 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada langsung pada tahun 2005, dan 11 diantaranya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 yang lalu. 3 Kabupaten/Kota yang lain akan segera menyusul pada awal tahun 2006, yang tentunya segala persiapan sudah dimulai sejak tahun 2005.

<sup>45</sup> Joko J. Prihatmoko.2005 Op.cit. Hal. 10

<sup>46</sup> Ibid. Hal. 1

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pilkada merupakan perpanjangan agemnda dari pemilu. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah<sup>47</sup>

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

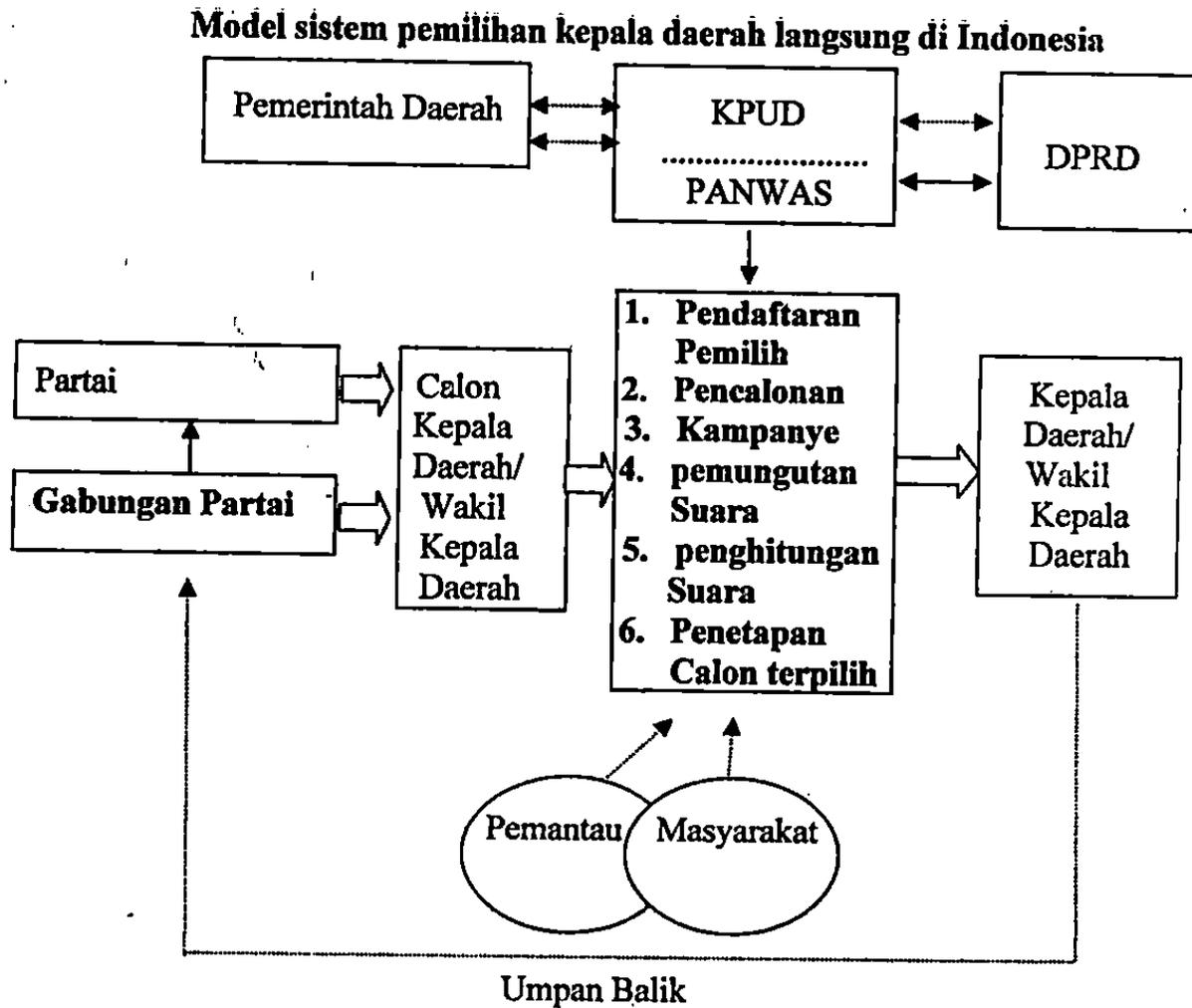
Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Sistem pemilihan secara langsung terdiri dari beberapa sub bagian, sub bagian sistem itu adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pendaftaran pemilih pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan calon terpilih. Masing-masing tahapan kegiatan terdiri dari sendiri-sendiri dan memiliki garis batas demarkasi yang tegas namun tidak dapat saling meniadakan dan bahkan saling melengkapi. (Lihat pada gambar 1.1)<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Iko I. Prihatmoko 2005 Op.cit. Hal. 305 dan 309.

Gambar. 1.1.



#### 4. Resolusi konflik

Resolusi konflik sebagai bidang spesialis tersendiri mulai berkembang pada pasca perang dingin. Penyelesaian konflik juga dihadapkan dengan tantangan baru.<sup>49</sup>

Bidang ini mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an, pada puncak perang dingin, kepada pengembangan senjata nuklir dan konflik antara Negara Adikuasa tampaknya mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Sekelompok pelopor dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda melihat manfaat mempelajari

konflik sebagai sebuah fenomena umum, yang terjadi dalam hubungan Internasional, politik dalam negeri, hubungan industri, komunitas, keluarga dan antar individu. Mereka Melihat potensi untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan potensial dengan latar belakang hubungan industri dan mediasi komunikasi kepada konflik secara umum, termasuk konflik sipil dan internasional.<sup>50</sup>

Stewart memformulasikan resolusi konflik melalui mekanisme politik yang inklusif dan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif. Politik inklusif bertujuan mengurangi dominasi politik satu kelompok dan mendistribusikannya kepada kelompok lain, dengan demikian membuka peluang partisipasi politik yang luas dari berbagai kelompok atau kalangan yang berbeda<sup>51</sup>.

Model kedua resolusi konflik adalah implementasi sistem sosial dan ekonomi inklusif. Sama halnya dengan politik inklusif, model ini bertujuan mengurangi kesenjangan horisontal. Kebijakan sosial dan ekonomi inklusif mencakup sektor pemerintah dan sektor swasta Dalam sektor pemerintahan, kebijakan yang dikeluarkan diarahkan untuk mendistribusikan manfaat antarkelompok secara berimbang dalam hal bantuan dan pemberian layanan umum, seperti mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, layanan kesehatan, air dan sanitasi lingkungan, perumahan dan subsidi konsumen. Dalam sektor swasta, diferensiasi pendapatan dan kesempatan kerja berpotensi menjadi sumber konflik. Selain itu dalam sektor ini, intervensi kekuasaan politik, meski

<sup>50</sup> . Ibid hal. 1-2

<sup>51</sup> . Dhani, Cholid, 2006. *Organisasi Dan Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.

tidak kentara, langsung atau tidak langsung turut menciptakan diferensiasi kelompok<sup>52</sup>.

Kalau konflik tidak bisa dihilangkan persoalannya kemudian adalah bagaimana konflik itu dikelola agar konflik menemukan dimensi etisnya. Dalam menjawab permasalahan ini para ahli terbelah ke dalam kelompok pasif dan konstruktivis. Kaum pasifis seperti Erasmus of Rotteram (1514), Emeric Cruce (1623), William Penn (1663), John Belers (1710), dan Abbe de Saint-Piere (1712) berpendapat bahwa penggunaan instrumen kekerasan merupakan alternatif solusi masalah-masalah sosial yang selalu dihadapi umat manusia. Sedangkan kalangan konstruksionis berpendapat bahwa kekerasan sesungguhnya dapat dilenyapkan dalam perjalanan peradaban manusia. Lenyepnya beberapa produk sosial berupa kekerasan seperti perbudakan dan diskriminasi rasial bagi kaum konstruksionis merupakan contoh kemungkinan dilenyapkannya kekerasan dalam kehidupan umat manusia.<sup>53</sup>

Ada dua kerangka berpikir yang berusaha menjawab kemungkinan lenyapnya kekerasan dalam kehidupan manusia yang semakin beradab. Pertama, kerangka yang ditawarkan John Mueller (1989) dalam bukunya *Retreat From Doomsday: The Obsolence of Major War*. Dalam hal ini Mueller berpendapat bahwa pengalaman kekerasan traumatik yang dialami suatu bangsa dapat menghasilkan suatu kesadaran kolektif tentang perlunya menempatkan kekerasan bersenjata sebagai suatu kegiatan terlarang.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ibid, hal 110

<sup>53</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Op. Cit., hal 116.

<sup>54</sup> Ibid., hal 116.

Kerangka berpikir kedua adalah tesis Imanuel Kant tentang *democratic peace* yang antara lain menyatakan bahwa negara demokratis tidak pernah berperang dengan negara demokratis lainnya. Tesis ini mengandaikan bahwa perdamaian *demokratic* adalah sebuah kondisi yang memungkinkan lenyapnya konflik dan kekerasan dalam kehidupan bangsa-bangsa.

Kembali lagi persoalannya adalah pada bagaimana konflik harus dikelola bukan membiarkannya sedemikian rupa, walaupun konflik pada ujungnya akan menghasilkan kesadaran kolektif tentang perlunya menghindari kekerasan. Hal ini karena pengalaman traumatik sendiri sebenarnya perlu dicegah sedemikian rupa. Untuk itulah diperlukan model-model resolusi konflik. Dengan mengacu kepada negara multi etnis, Nurhasim menyodorkan lima model regulasi konflik.<sup>55</sup>

1. Model partisi, yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dengan etnis lainn. Model ini jarang sekali digunakan dan hal ini hanya dimungkinkan apabila sebuah etnis benar-benar hidup terpisah dari garis demarkasi negara.
2. Model dominasi, yaitu satu dominasi etnis terhadap etnis lain, biasanya melalui kekerasan atau atau tindakan diskriminatif. Model ini mendasarkan pada asumsi kekerasan sebagai alternatif mengakhirin kekerasan lebih lanjut.
3. Melalui proses asimilasi. Model ini adalah bentuk halus dan maju dari model kedua yang dilakukan secara alami. Keempat melalui model konsolidasi. Model ini mengakui eksistensi setiap perbedaan

yang ada dan mencoba untuk mengharmonikan perbedaan perbedaan itu. Dalam model ini kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan dalam berbagai hal, tetapi berbagai ketentuan diputuskan berdasarkan konensus dan kompromi.

4. Memiliki keserupaan dengan model keempat, yaitu pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Model ini disebut dengan sinkretisme. Negara dalam hal ini berusaha mengakomodasikan dan mengekspresikan berbagai perbedaan yang ada dan menganggap semua etnis yang ada memiliki posisi yang sama dan diperlakukan secara adil.

Versi lain tentang resolusi konflik adalah apa yang ditawarkan Johan Galtung. Galtung sebagaimana dikutip Nurhasyim menawarkan tiga model yang berkaitan satu sama lain yaitu *peace keeping*, *peace building*, dan *peace making*. Ketiga Kerangka model itu bisa dilihat dengan Tabel di bawah ini.<sup>56</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Resolusi Konflik Versi Johan Galtung**

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peace keeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau militer
Pertentangan Kepentingan	<i>Peace Making</i> (aktivitas politik)	Pemimpin atau Tokoh
Struktur sosial dan Sikap Negatif	<i>Peace building</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum

Model *peace keeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. *Peace building* adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Karena itu lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini;<sup>57</sup>

Pertama, interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan sosial. Ketiga komunikasi terjadi secara intim (bukan kasual). Keempat proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak dan kelima, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

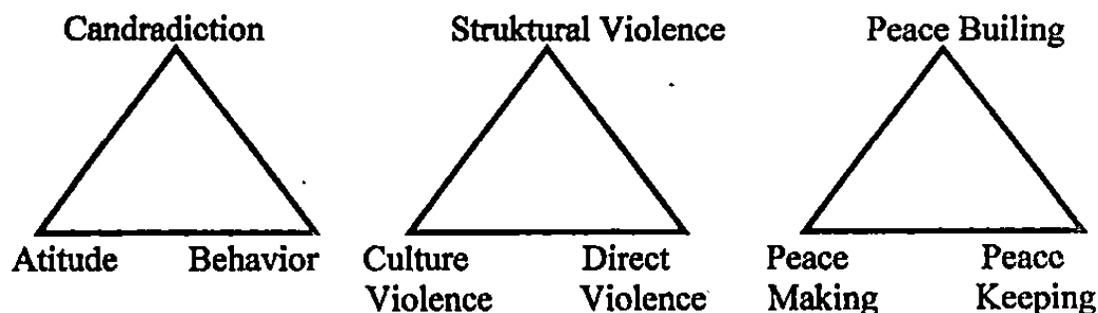
Sedangkan *peace making* adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode bisa dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik. Dalam kasus dimana negara tidak memiliki legitimasi, pendekatan konvensional pasti gagal dan harus dicari alternatif solusi melalui alternatif *dispute resolution (ADR)* yang bertujuan menyelesaikan konflik

dengan cara langsung mengarah pada persoalan utama, kendati secara hukum illegal. Model ini juga dikenal sebagai *Interactive Conflict Resolution*.

Embrio resolusi konflik yang menghubungkan antara konflik, kekerasan dan kedamaian adalah pemikiran Johan Galtung. Galtung merupakan salah seorang pendiri are resolusi konflik ini. Pemahamannya yang luas mengenai akar-akar kekerasan struktural dan cultural sebagaimana telash sedikit disinggung di atas, sangat baik dan berguna bagi siapa saja yang ingin menggambarkan dan mengembangkan resolusi konflik secara relational, simetris dan psikologis.

Di akhir tahun 1960-an, Johan Galtung menawarkan model konflik yang mencakup konflik simetris dan konflik asimetris. Dia menyarankan bahwa konflik dapat dilihat sebagai segitiga vertikal *contradiction (C) Attitude (A) dan Behavior (B)*. Kontradiksi (*contradiction*), merujuk pada sesuatu yang tersembunyi dan berada di bawah situasi konflik, termasuk kenyataan ataupun persepsi tentang ketidaksejajaran tujuan (*incompatibility of goals*) diantara para pihak di dalam konflik. Atau menggunakan terminologi Mitchel "*mis-match between social values and social structure*"( lihat gambar 1.1)<sup>58</sup>

**Gambar 1.2.**  
**Medel Galtung tentang konflik kekerasan dan kedamaian**



Satu kebiasaan khas konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri Gambar Dibawah menggambarkan 5 pendekatan terhadap konflik.dibedakan oleh apakah perhatian bagi diri sendiri atau perhatian bagi orang lain( lihat gambar 1.2).<sup>59</sup>

**Gambar 1.3.**

**Lima Pendekatan untuk Konflik**

Perhatian Terhadap Orang lain	Menghasilkan	Memecah Masalah
	Berkompromi	
	Menarik Diri	Menaklukkan
	Peduli Pada Diri Sendiri	

Apa yang terjadi ketika pendekatan Konflik bagi kedua pihak dipertimbangkan secara bersama-sama? Pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang diperoleh mungkin adalah hasil kalah-menang (satu pihak menang, satu pihak kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada).

Penyelesaian konflik juga bisa diselaikan dengan teknik Negosiasi, Teknik negosiasi adalah suatu proses terstruktur digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu ketika masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Dalam banyak kasus negosiasi berlangsung tanpa keterlibat pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mencari klarifikasi tentang

<sup>59</sup> Hugh miell, Oliver Ramshotham, Tom Woodhouse, On cit hal 8

isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung diantara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, ketika jalur komunikasi antara keduanya belum betul-betul putus, atau pada tahap ketika kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai.<sup>60</sup>

Kita juga bisa menggunakan teknik mediasi untuk menyelesaikan konflik, teknik mediasi seperti teknik negosiasi, mediasi juga merupakan bentuk keterampilan yang kita praktikkan setiap hari, tetapi kita tidak menyebutnya sebagai mediasi. Ketika dua orang berpendapat berbeda dan ada pihak ketiga, misalnya anggota keluarga atau teman ikut campur untuk melakukan klarifikasi masalah dan membicarakannya dari pada bertengkar, ini pun suatu bentuk mediasi. Ketika mediasi secara langsung gagal mencapai tujuannya dan jalur komunikasi kedua belah pihak terputus, ada peluang bagi pihak ketiga untuk ikut campur, pihak ketiga ini mungkin adalah sukarelawan, atau seorang yang diminta oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator. Dalam berbagai kejadian, mediator ini dipaksa oleh suatu organisasi atau suatu sistem, misalnay mediator dari PBB, namun prinsipnay mediator harus bisa diterima oleh kedua belah pihak.<sup>61</sup>

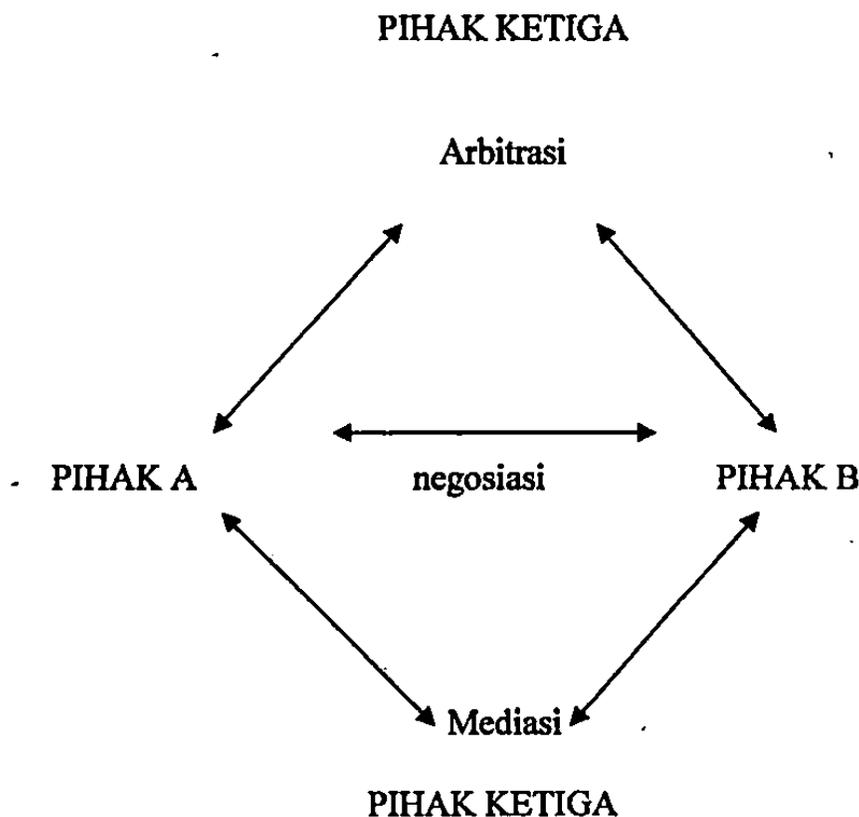
Intervensi pihak ketiga, pihak ketiga adalah sebagai mediator yang tidak mempunyai kekuasaan, komunikasinya kuat, tetapi tidak mempunyai sumber kekuasaan miliknya sendiri. Dalam situasi lain mungkin ada pihak lain yang berkuasa yang dapat mengubah tidak hanya struktur komunikasi tetapi jugaa

<sup>60</sup> Headert, Anahman Merdianinguh, S.P., Op. Cit. hal. 2

keseimbangan kekuasaan. Pihak ketiga seperti ini dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat disamping juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijaksana terhadap imbalan dan hukuman (dorongan positif dan negatif), dan mereka dapat mendukung hasil yang satu dan bukan hasil yang lain (lihat gambar 1.3

**Gambar. 1.4.**

*Intervensi pihak ketiga dengan paksaan dan tanpa paksaan*



Pada akhir tahun 1960an Galtung (1969;1996,72) mengaju sebuah model konflik yang berpengaruh, yang meliputi konflik yang simetris ataupun tidak simetris. Dia menyatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi (C), sikap (A) dan perilaku (B) pada puncaknya (lihat gambar berikut) disini kontradiksi yang merujuk pada dasar situasi konflik yang



menekakan aspek subyektif ini dikatakan mempunyai pandangan ekspresif terhadap sumber-sumber konflik. Prilaku adalah komponen ketiga. Prilaku dapat termasuk kerja sama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Prilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan dan serangan yang merusak. Para analisi yang menekankan aspek obyektif seperti hubungan struktural, kepentingan material atau perilaku yang bertentangan dikatakan mempunyai sumber-sumber konflik.<sup>63</sup>

Lebih jauh, karena beragamnya sumber konflik kontemporer dan keadaan politik darurat yang kompleks, maka di perlukan respon pada tingkat berbeda. Perubahan dalam konteks konflik dapat tergantung pada pengatur internasional dan regional, konflik didalam negara atau terhadap negara mungkin memerlukan perubahan struktural pada tingkat negara, konflik antara pihak-pihak yang bertikai akan tetap memerlukan pemecahan pada tingkat relasional, dan perubahan budaya pada semua tingkat mungkin perlu transformasi wacana dan institusi yang mempertahankan dan menghasilkan kembali kekerasan. Tekanan yang lebih besar sekarang ditempatkan pada integrasi tingkat yang berbeda dimana pembentukan perdamaian dan penyelesaian konflik perlu bekerja dalam negara-negara yang terlibat, dengan tekanan khusus pada pentingnya proses "dari bawah ke atas". (lihat gambar 1.5)<sup>64</sup>

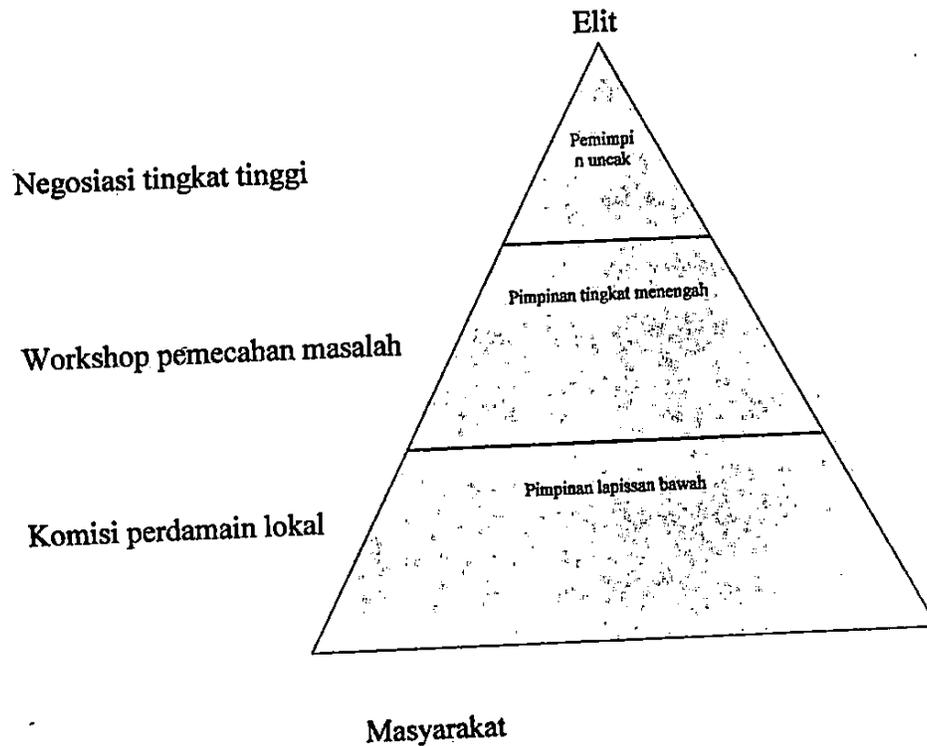
---

<sup>63</sup> Ibid hal. 21

<sup>64</sup> Ibid hal. 26

Gambar.1.6.

*Aktor dan pendekatan untuk menciptakan perdamaian*



*Sumber. From Lederach, 1997.*

### **E. Definisi Konsepsional**

- 1.. Konflik adalah benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama.

2. Konflik massa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih baik itu individu atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki tujuan atau sasaran yang tidak sejalan.
3. Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang melibatkan rakyat secara langsung sebagai pemilih, penyelenggara, pengawas, dan sering kali akses pencalonan terbuka untuk rakyat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
5. Hubungan daerah-pusat adalah pengelolaan kewenangan yang melibatkan pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat berupa desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Massa adalah sejumlah orang yang bersifat sementara dan jarang sekali dapat dibentuk kembali serta terbagi menjadi tiga kategori besar. Yakni, (1) massa moral; (2) massa kalkulatif; dan (3) massa alienatif

7. Resolusi konflik adalah Metode untuk penyelesaian benturan-benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, secara seimbang dan adil, untuk menuju arah pembangunan dan keadilan sosial.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Faktor-faktor penyebab konflik.:**

#### **a. Faktor Internal penyebab konflik antara lain :**

- i). Dendam kelompok dan dendam sejarah, yang umumnya sangat peka untuk diprovokasi.
- ii). Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi.
- iii). Rapuhnya simbol perekat dan pemersatu yang mencakup nasionalisme, etnisisme, etika dan budaya politik yang luhur.
- iv). Sikap dan perilaku aktor politik yang tidak terkendali, menerabas dan terjerumus ke deviant politik.

#### **b. Faktor Eksternal penyebab konflik antara lain::**

- i). Belum bakunya infrastruktur pemilihan pejabat publik.
- ii). Lemahnya institusionalisasi demokrasi di tingkat lokal (KPUD).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data kualitatif kemudian memaparkan disertai memberi penjelasan mengenai fenomena tertentu.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti adalah konflik Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang ditemukan atau dikumpulkan berupa kata-kata dan dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan konflik pasca Pilkada di Sulawesi Selatan 2007. Oleh karena itu, data penelitian ini membutuhkan:

- a. Data primer: yakni, data yang diperoleh dari pihak yang berkonflik dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2007, dengan pencarian data melalui situs internet (*website*).
- b. Data sekunder: yakni, data yang diperoleh peneliti dari dokumen atau hasil penelitian terdahulu, yaitu data tentang fenomena konflik Pilkada Sulawesi Selatan 2007.

### 3. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa sejumlah informasi yang didapat dari data primer dan sekunder (study literatur) serta sejumlah

---

<sup>65</sup> Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hal..24

wacana-wacana yang beredar yang memuat tentang konflik pasca pilkada Sulawesi Selatan 2007.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik Dokumentasi.

Untuk mengumpulkan yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu penulis menggunakan metode dokumentasi yang mencerminkan tindakan penulis dalam mengumpulkan data sekunder, yaitu sejumlah informasi yang berada di beberapa dokumen, baik pribadi maupun publik. Kesemua informasi yang penulis kumpulkan di beberapa dokumen berkaitan dengan permasalahan penelitian, tentang konflik pasca pilkada di Sulawesi Selatan 2007.

##### b. Teknik Wawancara.

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara langsung sudut pandang, opini dan penilaian khususnya dari para mahasiswa Sulawesi Selatan yang berada di Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih seputar konflik massa pasca pilkada Sulawesi Selatan tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun tahap analisa data penelitian ini adalah<sup>66</sup>:

a. Menempatkan data-data ke dalam kategori-kategori. Dalam penelitian ini, kategori-kategori terdapat dalam teori konflik dan massa

- b. Memperluas kategori sehingga didapat kategori data yang murni dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya.
- c. Mencari hubungan antarkategori, dan
- d. Menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur teori yang koheren (masuk akal, saling berlingketan dan bertalian secara logis).

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi empat bab, yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kerangka dasar teori dan metode penelitian.

**BAB II** : Karakteristik unit analisis penelitian, yaitu terdiri dari pengertian pilkada serta kronologis Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007.

**BAB III** : Masalah pokok dalam penelitian yaitu mengenai analisa deskriptif tentang penyebab konflik Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007 melalui sejumlah teori *konflik dan massa*.

**BAB IV** : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.